



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



dprkpkotajambi

pengaduan_pju

0853 8266 1819

Get the right information



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2025.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2025, DPRKP melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja dan sasaran strategis yang dilakukan pada tahun 2025, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 2025-2029, Rencana Kerja tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada tahun 2025.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan semua jajaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Semoga dapat terwujudnya Kota Jambi yang lebih baik yang bermanfaat nyata untuk masyarakat Kota Jambi.



Kepala Dinas PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI

MURTADHO AL-IDRUS, SP, M.H

Pembina

NIP. 19780509 200901 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. Struktur Organisasi.....	2
1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4
1.3. Isu - Isu Strategis.....	4
1.4. Kepegawaian	5
1.5. Keadaan Sarana Prasarana	10
1.6. Keuangan	12
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	12
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13-13
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah	14
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah	15
2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah	15
2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	22
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran.....	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33-33
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	33
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	34
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini DenganTahun Lalu	36
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi Perangkat Daerah	37
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Inin dengan Standar Nasional /Provinsi	38
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	38
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	40
3.2 Realisasi Anggaran 2024	42
 BAB IV PENUTUP	57-57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rencana Tindak lanjut	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6
Tabel 1.2.	Daftar Jenis Barang dan Kondisi Per 31 Desember 2025	10
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025-2029	16
Tabel 2.3.	Sasaran, Program dan Kegiatan	16
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.5.	Target Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025.....	23
Tabel 2.6.	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategi.....	23
Tabel 2.7.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	24
Tabel 3.1.	Kategori Skala Peningkatan Capaian Kinerja.....	33
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	34
Tabel 3.3.	Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024.....	34
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	36
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026	37
Tabel 3.6.	Analisis Efisiensi.....	40
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	42
Tabel 3.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2024.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan Landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis tahun 2025-2029 dan rencana kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.
2. Mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi didalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1.1 Struktur Organisasi

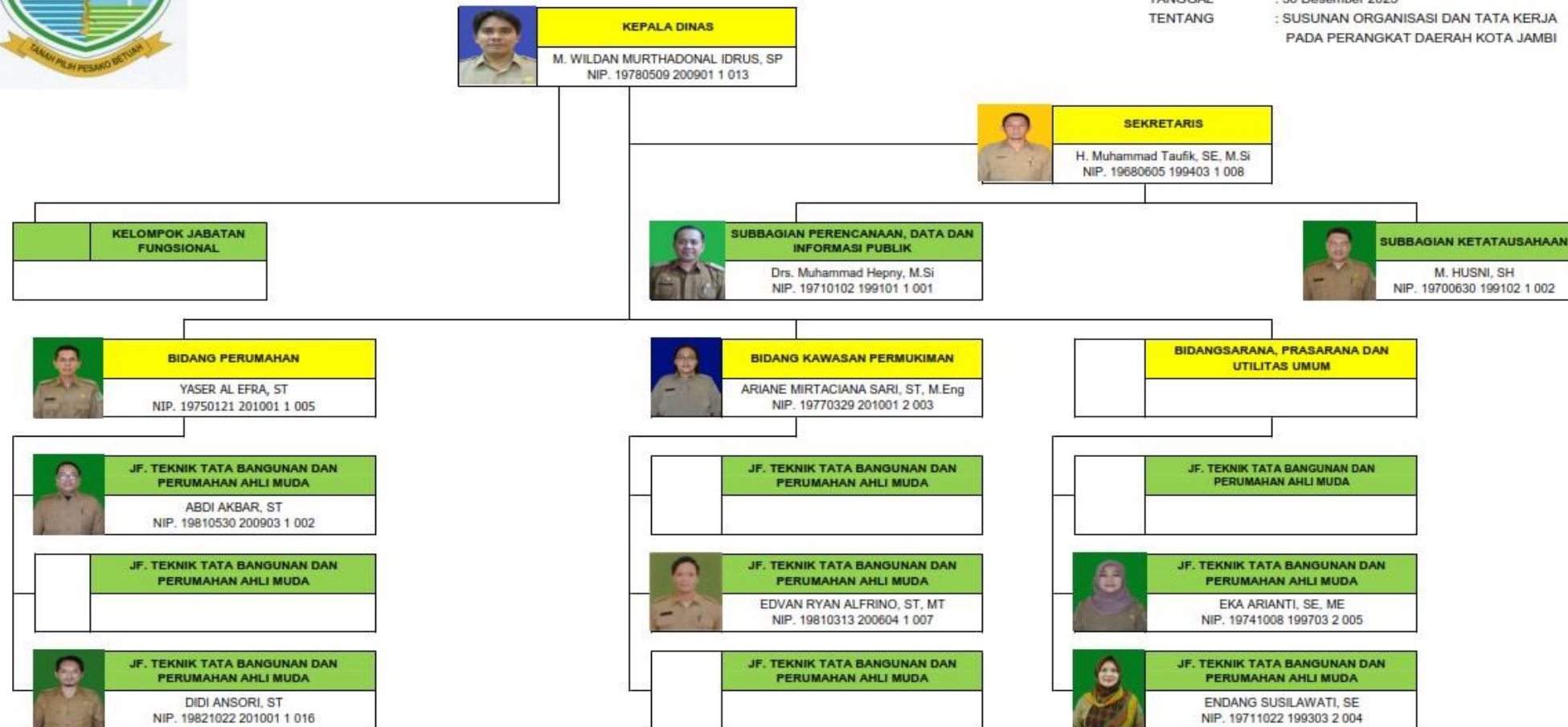
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR : 50 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 Desember 2025
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI





1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan utilitas perkotaan Kota Jambi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- b. Penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan utilitas perkotaan;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu - Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannnya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksi dengan baik.



- b. Selain permasalahan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang.
- c. Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi teknologi.
- d. Permasalahan kelembagaan sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasilan. Organisasi harus memenuhi semua unsur baik struktural maupun fungsional agar tercipta sistem kerja yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Jumlah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi memiliki sumber daya manusia pada tahun 2025 terdapat 86 orang yang terdiri dari 29 orang PNS, 43 Orang PPPK, 12 Orang Pekerja Harian Lepas, 1 Orang Jaga Malam dan 1 Orang Cleaning Servis. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 66% (57 orang) dan sisanya sebanyak 34% merupakan pegawai perempuan (29 orang).



Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	NAMA	PENDIDIKAN
	NIP	TERAKHIR
1	M. WILDAN MURTADHO AL-IDRUS, SP, M.H NIP. 19780509 200901 1 013	S.I. TEKNIK
2	H. MUHAMMAD TAUFIK, SE,M.Si NIP. 19680605 199403 1 008	S.2 ILMU SOSIAL
3	ARIANE MIRTACIANA SARI, ST, M.Eng NIP. 19770329 201001 2 003	S.2 TEKNIK
4	YASER AL EFRA, ST NIP. 19750121 201001 1 005	S.I TEKNIK
5	Drs. MUHAMMAD HEPNY, M.Si NIP. 19710102 199101 1 001	S.2 ADMINISTRASI PUBLIK
6	M. H U S N I, SH NIP. 19700630 199102 1 002	S.I HUKUM
7	EKA ARIANTI, SE, ME NIP. 19741008 199703 2 005	S.2 EKONOMI
8	ENDANG SUSILAWATI, SE NIP. 19711022 199303 2 004	S.I EKONOMI
9	EDVAN RYAN ALFRINO, ST, MT NIP. 19810313 200604 1 007	S.2 TEKNIK
10	ABDI AKBAR, ST Nip. 19810530 200903 1 002	S.I. TEKNIK
11	DIDI ANSORI, ST NIP. 19821022 201001 1 016	S.I TEKNIK
12	NUR INDAH SARI. H, ST NIP. 19840411 200903 2 009	S.I TEKNIK
13	ROY PARULIAN SIMANGUNGSONG, SH NIP. 19800509 201001 1 007	S.I HUKUM
14	MIFYA ERLIZA,ST NIP.19811001 201001 2 008	S.I TEKNIK
15	SULISTIAWATI, S.Kom NIP.19780724 201001 2006	S.I KOMPUTER
16	LEDYANA, SE NIP. 19810515 200903 2 008	S.I EKONOMI
17	ANGLINA, ST NIP. 19750623 199703 2 004	S.I TEKNIK
18	MUHAMMAD FADHLI FERNANDO, ST NIP. 19880415 201503 1 004	S.I TEKNIK
19	HAVIF, S.IP	



	NIP. 19790917 200012 1 004	S.I ILMU PEMERINTAHAN
20	DIAN EKA PUTRI, SE NIP. 19871002 201903 2 003	S.I EKONOMI
21	RENDRA YUSPIADINATA NIP. 19800504 200901 1 013	SLTA
22	RAHMAT GUNTUR NIP. 19820510 200801 1 006	SLTA
23	DESY MARLINA NIP. 19811204 201001 2 005	SLTA
24	SUTJIPTO NIP. 19681208 201001 1 002	SLTA
25	SYARIF NIP. 19700826 201001 1 003	SLTA
26	RUDIYANTO NIP. 19770719 200801 1 004	SLTA
27	INDRA TRIJAYA.HS NIP. 19740714 200901 1 008	SLTA
28	NANDA AIKA NIP. 19870717 200801 1 001	SMA
29	ABDUL MANAN, ST NIP. 19860402 202421 1 002	S.I TEKNIK SIPIL
30	APRISCA DWI HELENA, SE NIP. 19960428 202421 2 010	S.I EKONOMI
31	CHAIRUL YUDA, SH NIP.19931009 202421 1 011	S.1. HUKUM
32	DINIYAH LESTARI, SE NIP. 19960227 202421 2 007	S.1. EKONOMI
33	EGA DWI MEILANDA, SE NIP. 19960530 202421 2 020	S.1. EKONOMI
34	EKA VIDYA NUGRAHA, ST NIP. 19890411 202421 1 019	S.I TEKNIK SIPIL
35	ELANDA ELSYA PUTRA, ST NIP. 19970131 202421 1 002	S.I TEKNIK SIPIL
36	FRISKI AYU INDRIA, S.Pd NIP. 19900917 202421 2 001	S.1. PENDIDIKAN EKONOMI
37	JOHAN WARTHA, ST NIP. 19920103 202421 1 004	S.I TEKNIK SIPIL
38	MERY JANNATI, S.Kom NIP. 19910511 202421 2 016	S.1 SISTEM INFORMASI
39	MUHAMMAD ARI AKBAR, SM NIP. 19961128 202421 1 002	S.1 MANAJEMEN



40	NOVITA AFRIANI, S.Kom NIP. 19890405 202421 2 025	S.1 SISTEM INFORMASI
41	NOVY PUSPITA, ST NIP. 19861123 202421 2 002	S.1 TEKNIK ARSITEKTUR
42	RISMA DWI NOVIANA, S.Kom NIP. 19941105 202421 2 010	S.1 SISTEM INFORMASI
43	SETIO MURDIONO, SE NIP. 19921207 202421 1 009	S.1 EKONOMI
44	WAHYU MELDINO, ST NIP. 19911128 202421 1 011	S.1 TEKNIK SIPIL
45	WILLDAN KURNIAWAN, S.Kom NIP. 19910403 202421 1 016	S.1 SISTEM INFORMASI
46	CHUSNUL KHOTIMAH NIP. 19970819 202521 2 004	SMA
47	MUSRONI NIP. 19790209 202521 1 010	SMA
48	SHELLA SASTIA ANDINI NIP. 20000129 202521 2 005	SMA
49	RESKI RAMADHANI NIP. 19970119 202521 1 013	SMA
50	ABDUL WAHAB NIP. 19820606 202521 1 002	SMA
51	ANDI GUNAWAN NIP. 19851219 202521 1 006	SMA
52	HENGKI PRIMA NIP. 19961125 202521 1 001	SMA
53	DICKY HARRIS PRANATHA NIP. 19960602 202521 1 003	SMA
54	MUHAMMAD FADEL, A.Md NIP. 19940415 202521 1 004	D.III AKUNTANSI
55	MUHAMMAD TAUHID NIP. 19980107 202521 1 010	SMA
56	ANKA RIZKI NIP. 19920316 202521 1 001	SMA
57	VEBRIANKA ANZANI, S.E NIP. 19980625 202521 2 001	S.1 AKUNTANSI
58	RD. KHAIRUL ROZI NIP. 19750906 202521 1 010	SMP
59	TRI YULIANTO, S.E NIP. 19990712 202521 1 001	S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN
60	AMAT SADLI, S.E NIP. 19880630 202521 1 002	S.1 MANAJEMEN
61	AHMAD BASRI	SMA



	NIP. 19881009 202521 1 001	
62	NURHAIDAH, S.H NIP. 19880121 202521 2 001	S.1 ILMU HUKUM
63	ASFEN PURDA NIP. 19720130 202521 1 001	SMA
64	MUJianto NIP. 19680408 202521 1 005	SMA
65	MUHAMMAD DZAT NIKA, S.Kom NIP. 19940318 202521 1 001	S. 1 SISTEM INFORMASI
66	BENNI SEPRIANSYAH NIP. 19890418 202521 1 054	SLTA
67	IMELDA PUTRI NURHALIZA, S.Kom NIP. 19991204 202521 2 012	S.I KOMPUTER
68	LARASATI KARINA OKTAVIANI, SM NIP. 19971030 202521 2 032	S.1 MANAJEMEN
69	HENDRA NIP. 19810412 202521 1 035	SLTA
70	MEGGIS GUSTRIADUM RETADA, SH NIP. 199608232025211048	S.1. HUKUM
71	SUHENAN NIP. 198603162025211081	SMP
72	HERMAN SAWIRAN	SLTA
73	IDHAM KHALID	SLTA
74	SABIKA WULANDARI	SLTA



1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada table berikut:

Tabel 1.2

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

NO	Nama Barang	Jumlah/ Luas
1	Mobil Kepala Dinas	1 unit
2	Mobil Operasional	1 unit
	Sekretariat	
	Roda 4	3 unit
	Roda 2	8 unit
3	Bidang Perumahan	
	Roda 4	2 unit
	Roda 2	2 unit
4	Bidang Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias dan Pemakaman	
	Roda 6	3 unit
	Roda 4	8 unit
	Roda 2	6 unit
5	Bidang Kawasan Pemukiman	
	Roda 4	1 unit
	Roda 2	3 unit
	Jumlah	
	Roda 6	3 unit
	Roda 4	16 unit
	Roda 2	19 unit
6	R. Kadis	48 M ²
7	R. Sekretariat	96 M ²
8	R. Ka. Bidang Tata Ruang	12 M ²
9	R. Loket	21 M ²
10	R. PJU	48 M ²
11	R. Bidang Perumahan	32 M ²
12	R. Bidang Pembinaan dan Pengawasan	12 M ²
13	R. WC	54 M ²
14	R. Arsip	48 M ²
15	R. Rapat	28 M ²
16	Dharma Wanita	120 M ²
17	Gudang	18 M ²



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2025

18	Mushollah	36 M ²
19	Peralatan Bongkar Reklame/ Mesin Las	1
20	AC	19
21	Kamera Pengawas (CCTV) Dan Perlengkapanya	0
22	Filling cabinet	6
23	Tangga Lipat	6
24	Almari Es	1
25	Kamera Digital	12
26	Komputer pc	6
27	Note book/ Laptop	26
28	Scanner	1
29	Sound System	4
30	Kursi	40
31	Meja	31
32	Proyektor	2
33	Printer	20
34	Televisi	1
35	Meubelair	1
36	Almari Arsip	14
37	Almari Keuangan	1
38	Lori	5
39	Bending Mechine	1
40	Brankas	1
41	Mesin Chainsaw	1
42	Mesin Potong Rumput	2
43	Tangga Geser	2
44	Tangga Teleskopic	1
45	Kursi Panjang Tamu	1
46	Pesawat Drone	2
47	Hardisk	4
48	PC	10
49	Tablet	5
50	Alat Ukur Laser	4
51	Alat GPS	2
52	Bending Mechine	1
53	Mesin Absen	2



1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.666.570.522. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.



BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecah masalah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi telah menyusun Rencana strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui pencapaian visi dan misi dari Walikota Jambi. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan sarana untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mendukung perwujudan Misi Walikota Jambi yang ke-5.



2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG
BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN
SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi mendukung misi ke 5:

**“Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan”**



2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dari Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Akseibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ”**.

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indicator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan Pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Sasaran Strategis
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	(Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR X 5%) + (Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani x 5%) + (Persentase Peningkatan Perumahan yang di layani utilitas umum x 90%)	85,88%	48,86%	47,36%	53,81%	60,19%

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran, program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progrma Kabupaten/Kota
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian



		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman	Nilai	8,67

Indikator Sasaran Persentase Perumahan dan Permukiman memiliki target sebesar 8,67% diperoleh dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.



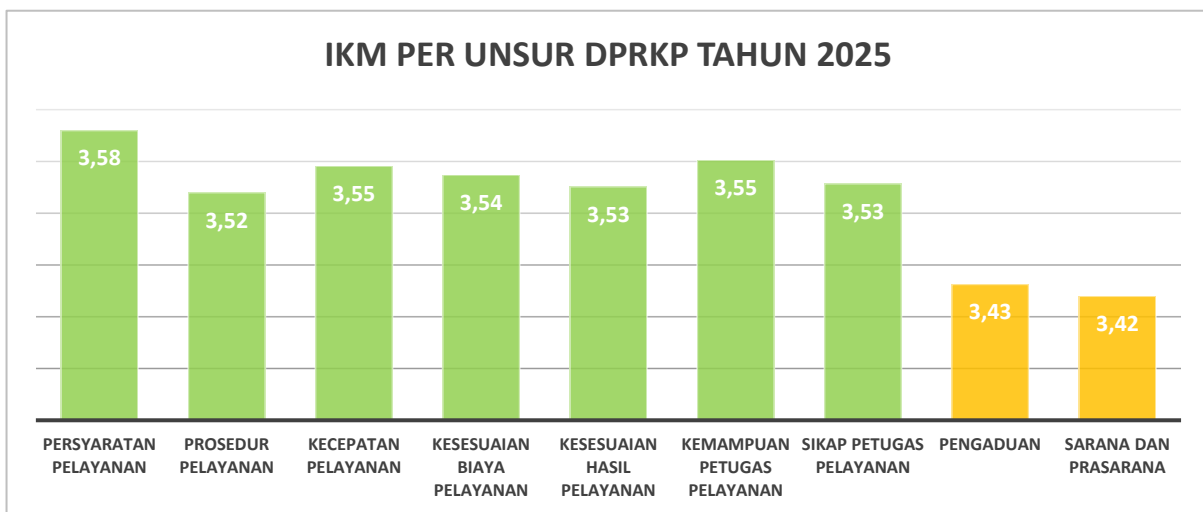
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).



Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,58	3,52	3,55	3,54	3,53	3,55	3,53	3,43	3,42
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	87,01 (A atau Sangat Baik)								
Nilai IKM setelah Konversi	8,70								

Grafik Nilai SKM Per Unsur



1. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dikali bobot 10% dengan target 79,67% diperoleh dari Jumlah Backlog yang tertangani (36.737 unit) dibagi Jumlah Backlog yang harus ditangani (39.847 unit) dikali dengan 100%.

2. Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani dikali bobot 15% dengan target 52,35% diperoleh dari Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (2.955 unit) dibagi dengan Total Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani (5.310 unit) dikali dengan 100%.



3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dikali bobot 70% dengan target 93,59%. Perhitungan indikator ini diukur dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari target jumlah lampu jalan yang tertangani (24.911 unit), sedangkan target jumlah lampu jalan yang tertangani s.d akhir periode renstra adalah sebanyak 27.171 unit. Jumlah target lokasi pemakaman yang tertangani sebanyak 75 lokasi pemakaman dari total jumlah lokasi pemakaman di kota Jambi sebanyak 99 lokasi pemakaman.

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Huruf	BB
Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	%	86.42
Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	52.35
Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	%	98.40

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Melaksanakan Kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.40.253.460.000,- Sedangkan anggaran perubahan menjadi Rp.45.666.570.522,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.41.728.841.386,- Dan belanja modal sebesar Rp.2.107.763.659,-.



Tabel 2.5

Target Belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
APBD Perubahan Tahun 2024

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasional	43.550.012.503	95,00%
Belanja Modal	2.116.558.019	5,00%
Jumlah	45.666.570.522	100%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.177.001.218	87,07%
		Program Pengembangan Perumahan	570.343.368	76,97%
		Program Kawasan Permukiman	2.283.211.700	98,92%
		Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	35.636.014.236	97,91%



LKIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2025

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 4 (lima) program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Berikut.

Tabel 2.7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut.

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target				Realisasi				Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	2025	2025	2025
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni	77,58%	77,58%	82,89%	85,88%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	7.177.001.218	6.248.953.502	87,07%
							<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	75	75	76	76	75	74,6	74,6	74,6	65.013.665	56.983.130	87,65%
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	3	0	0	4	3	0	0	49.272.755	41.718.410	84,67%
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	1	0	0	0	5.422.905	15.264.720	86,36%
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	5.811.701.761	5.215.511.331	90,54%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2025

						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	40	40	33	33	33	33	5.492.182.211	4.963.905.331	87,80%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	293.240.000	1.750.131.987	95,03%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	3	3	3	3	3	26.279.550	753.379.922	74,77%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	50%	116.600.000	100.265.847	85,99%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	75	0	0	0	0	0	75	66.600.000	66.600.000	100,00%

26



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2025

						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	100%	288.555.000	283.327.500	98,19%
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10	10	15	0	0	0	35	198.545.000	196.303.500	98,87%
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	10	6	0	0	0	21	198.545.000	196.303.500	98,87%
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	96,68%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	167.500.000	62.023.105	97,10%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	1	1	1	1	2.500.000	2.500.000	99,05%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	3	3	3	3	2.500.000	2.500.000	62,95%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25%	25%	25%	25%	10%	25%	25%	25%	360.098.600	218.260.261	100,00%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2025

2							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	8	5	9	5	3	6	285.144.800	194.397.451	99,00%
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	25	32	0	23	1	21	208.380.000	138.815.100	37,03%
							Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	75,00%	75,00%	75,00%	79,67%	75,00%	75,00%	81,72%	82,65%	570.343.368	438.991.013	76,97%
							Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	100%	100.000.000	0	0,00%
							Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	0	0	1	0	0	0	1	100.000.000	0	0,00%
							Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	133.727.663	108.155.098	80,88%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2025

						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	1	1	1	1	1	1	1	133.727.663	108.155.098	80,88%
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	25%	336.615.705	330.835.915	98,33%
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang /Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	1	0	0	1	0	0	121.990.329	119.227.020	0,00%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	1	2	2	1	1	0	3	3.748.914	3.014.430	98,05%

30

4



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2025

							Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,27%	93,27%	93,59%	93,59%	93,27%	93,27%	99,64%	99,64%	35.636.014.236	34.890.157.913	97,91%
							Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	0	0	1	0	0	0	0	1	65.815.863	63.289.777	96,16%
							Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	125	125	125	125	40	59	100	50	35.467.203.178	31.604.079.957	53,38%
							Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2	2	3	3	3	3	6	10	89.121.470	131.254.519	90,29%
							Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0	0	0	1	0	0	0	1	13.873.725	19.458.900	87,70%
																	45.666.570.522	43.836.605.045	95,99%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi kedepan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00-89,9
3	Cukup	65,00-74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$



3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni	(Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR X 10%) + (Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana X 5%) + (Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani x 15%) + (Persentase Peningkatan Perumahan yang di layani utilitas umum x 70%)	85,88%	85.93%	100.06%

Berdasarkan table diatas pada tahun 2025, indikator Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni memiliki relisasi sebesar 85,93% dengan capaian 100,06% Dari target sebesar 85,88% sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indicator ini termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan table 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam table 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	Jumlah Backlog Rumah Tertangani sampai dengan tahun 2025 : Jumlah Total	83.43%	92.20%	110.50%



		Backlog yang harus ditangani x 100%			
	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Terehabilitasi : Total Target Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana x 100%	100%	0%	0%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani : Total Target Rumah Tidak Layak Huni x 100%	52.35%	55.65%	106.29%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Perumahan yang di layani utilitas umum	(Persentase Lampu Jalan yang Tertangani x 95%) + (Persentase Makam Tertangani x 5%)	92.40%	97.66%	105.70%

Penjelasan dari target tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dengan target 83.43% memperoleh realisasi sebesar 92.20%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Backlog yang tertangani s.d Tahun 2025 dibagi dengan Jumlah Total Backlog Perumahan yang harus ditangani dikali 100%. Jumlah Pembangunan Rumah Baru sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 36.737 unit sedangkan Jumlah Backlog Perumahan yang harus ditangani sebanyak 39.847 unit. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR memiliki bobot sebanyak 10,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.
2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani dengan target 52,35% pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 55,65%, perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani sampai dengan tahun 2025 dibagi dengan Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani sampai dengan tahun 2025 dikali dengan 100%. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun 2025 sebanyak 2.955 unit dengan jumlah bedah rumah yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebanyak 82 Unit sesuai Keputusan Walikota Jambi Nomor 437 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani memiliki bobot sebanyak 15% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.



3. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dengan target 92,40% pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 97,66%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari realisasi jumlah lampu jalan yang tertangani sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 27.171 unit, sedangkan target jumlah lampu jalan yang tertangani s.d akhir periode renstra adalah sebanyak 27.500 unit. Jumlah lokasi pemakaman yang tertangani sebanyak 75 lokasi pemakaman dari total jumlah lokasi pemakaman di kota Jambi sebanyak 99 lokasi pemakaman. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum memiliki bobot sebanyak 70,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NDIKATOR SASARAN	2024			2025			PERSENTASE REALISASI 2025 TERHADAP REALISASI 2024
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	84.43%	80,22%	105.24%	85.93%	85.88%	100.06%	95.08%

Berdasarkan table diatas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 95.08%. Capaian kinerja tahun 2025 sedikit lebih rendah dari tahun 2024.

Hal ini dikarenakan di target rencana awal RENJA 2025 tercantum target jumlah bedah rumah layak huni sebanyak 100 unit, akan tetapi hanya terealisasi sebanyak 82 unit sesuai dengan Plafond Anggaran yang diperoleh dari TAPD Kota Jambi.

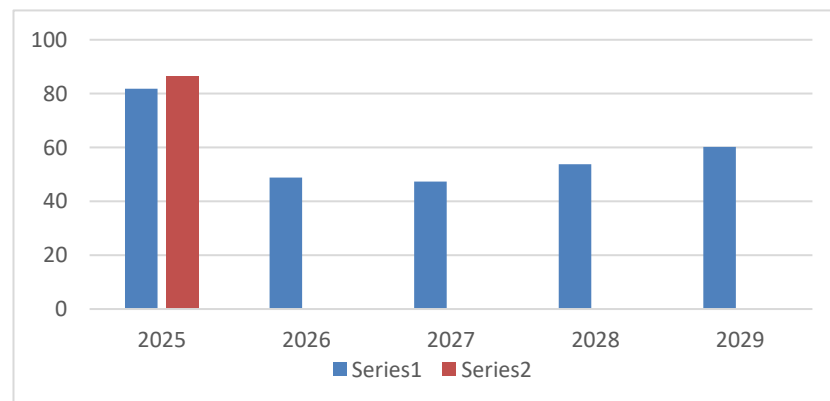


3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025
dan Target Renstra Tahun 2025-2029

INDIKATOR SASARAN	2025		2026		2027		2028		2029	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	81.87%	86.28%	48.86%	-	47.36%	-	53.81%	-	60.19%	-

Dari table diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah tercapai. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.



Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target

Realisasi tahun 2025 lebih tinggi terhadap target renstra di karenakan Target Akhir RPJMD Sampai Tahun 2029 Mengalami Peningkatan.



3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL/PROVINSI	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	50 Unit (Dumisake/Provinsi) 1 Unit Baznas Kota Jambi 1 Unit Baznas Provinsi Jambi 50 Unit Baznas Pusat	50 Unit 229 Unit 1 Unit 1 Unit	100% 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional dengan capaian sebesar 100%

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

FAKTOR PENGHAMBATAN ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

1. Masih kurangnya penganggaran atau keterbatasan anggaran melalui sumber dana APBD dalam peningkatan kualitas Rumah tidak Layak Huni bagi MBR.
2. Data RTLH Belum Sepenuhnya Sinkron Perbedaan data antara DTKS, data OPD, dan hasil verifikasi lapangan menyebabkan keterlambatan penetapan calon penerima bantuan.
3. Permasalahan Legalitas Lahan Sebagian RTLH berada di atas lahan tanpa alas hak yang jelas atau di kawasan tidak sesuai peruntukan, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif.
4. Belum maksimalnya sosialisasi dan promosi hunian rumah susun abdul manab menyebabkan belum optimalnya keterisian hunian rumah susun.
5. Terhambatnya proses serah terima PSU perumahan dikarenakan banyaknya perumahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Belum adanya perangkat daerah yang membidangi urusan bencana menyebabkan Belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat. Kekosongan perangkat daerah yang membidangi urusan bencana menyebabkan tidak adanya penetapan bencana yang masuk dalam kriteria standar pelayanan minimal perumahan rakyat.



7. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan belum maksimalnya monitoring dan pengawasan perumahan.

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Sinergi dalam Sumber Pendanaan Pemerintah daerah mengintegrasikan pendanaan dari APBD KOTA, APBD PROPINSI, APBN Dan Baznas, untuk memperluas cakupan penanganan RTLH
2. Pemutakhiran dan Validasi Data Berbasis Lapangan Dilakukan verifikasi by name by address melalui kolaborasi OPD (dinsos) dan kelurahan serta pemanfaatan sistem informasi perumahan
3. Kebijakan Adaptif terhadap Legalitas Lahan Diterapkan pendekatan selektif melalui surat keterangan penguasaan fisik tanah dan rekomendasi kelurahan, dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang
4. Untuk meningkatkan keterisian hunian rumah susun abdul manab, dilakukan sosialisasi dan promosi yang masif ke setiap perangkat daerah di kota jambi terkait dengan adanya fasilitas hunian yang dapat disewa oleh setiap aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah kota jambi
5. untuk optimalisasi proses serah terima PSU perumahan, telah dilakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan persyaratan teknis penyerahan PSU perumahan. terhadap produk hukum yang dipandang dapat dilakukan perubahan, maka DPRKP akan mengusulkan produk hukum perubahan yang dapat menjawab permasalahan yang menjadi penghambat serah terima PSU
6. terkait dengan belum adanya perangkat daerah yang membidangi urusan kebencanaan di kota jambi, pemerintah kota jambi Bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kota jambi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan daerah tersebut telah memuat adanya pembentukan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kota jambi. Pembentukan badan baru tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat di kota jambi
7. untuk melaksanakan kegiatan monitoring Pembangunan dan pengawasan pemanfaatan perumahan, maka diperlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai mengingat jumlah perumahan yang perlu dilakukan monitoring dan pengawasan cukup banyak

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2025:

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA%	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(5-4)
	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	100.06%	95.99%	4.07%

Berdasarkan table diatas, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100,06% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,99% dengan tingkat efisiensi sebesar (4,07%). Capaian kinerja diatas 100% akan tetapi penyerapan anggaran dibawah 100% karena efisiensi anggaran.

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2025.

1. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dengan target 83.43% memperoleh realisasi sebesar 92.20%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Backlog yang tertangani s.d Tahun 2025 dibagi dengan Jumlah Total Backlog Perumahan yang harus ditangani dikali 100%. Jumlah Pembangunan Rumah Baru sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 36.737 unit sedangkan Jumlah Backlog Perumahan yang



harus ditangani sebanyak 39.847 unit. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR memiliki bobot sebanyak 10,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.

2. Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani dengan target 52,35% pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 55,65%, perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani sampai dengan tahun 2025 dibagi dengan Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani sampai dengan tahun 2025 dikali dengan 100%. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun 2025 sebanyak 2.955 unit dengan jumlah bedah rumah yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebanyak 82 Unit sesuai Keputusan Walikota Jambi Nomor 437 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani memiliki bobot sebanyak 15% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dengan target 92,40% pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 97,66%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari realisasi jumlah lampu jalan yang tertangani sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 27.171 unit, sedangkan target jumlah lampu jalan yang tertangani s.d akhir periode renstra adalah sebanyak 27.500 unit. Jumlah lokasi pemakaman yang tertangani sebanyak 75 lokasi pemakaman dari total jumlah lokasi pemakaman di kota Jambi sebanyak 99 lokasi pemakaman. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum memiliki bobot sebanyak 70,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.



3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 95,99% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat Tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.177.001.218	6.248.953.502	87,07%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.013.665	56.983.130	87,65%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.272.755	41.718.410	84,67%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.422.905	4.683.300	86,36%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.951.600	3.577.700	90,54%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.951.600	3.469.500	87,80%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.251.850	8.792.310	95,03%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.560.000	16.120.800	74,77%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	184.800	184.800	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	4.890.000	98,79%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.740.910	15.264.720	96,97%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.070.260	2.977.020	96,96%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.241.200	3.241.200	100,00%



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.297.700	2.297.700	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.131.750	6.748.800	94,63%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.811.701.761	5.215.511.331	89,74%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.492.182.211	4.963.905.331	90,38%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.775.730.000	1.750.131.987	98,56%
Belanja Gaji Pokok PPPK	756.444.000	753.379.922	99,59%
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	188.737.000	180.153.936	95,45%
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	36.190.000	35.143.485	97,11%
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	98.422.000	93.945.000	95,45%
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.402.000	50.900.000	87,15%
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	90.860.000	89.503.326	98,51%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.557.000	47.755.000	92,63%
Belanja Tunjangan Beras PNS	109.865.000	102.184.620	93,01%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	33.417.000	32.130.340	96,15%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	98.805.000	48.329.504	48,91%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.211	20.134	36,47%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	26.000	14.162	54,47%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	139.371.000	121.006.000	86,82%
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	35.461.000	30.468.053	85,92%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.141.000	3.554.466	69,14%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.830.000	1.568.556	85,71%
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.429.000	10.663.529	69,11%
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.490.000	4.705.464	85,71%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.806.165.772	1.453.400.455	80,47%



Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	40.898.063	35.261.596	86,22%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	143.886.165	119.685.796	83,18%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	293.240.000	226.880.000	77,37%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.600.000	5.600.000	100,00%
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	287.640.000	221.280.000	76,93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.279.550	24.726.000	94,09%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.397.600	2.397.600	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.374.400	3.108.000	92,11%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.914.750	1.914.750	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.438.000	5.455.650	84,74%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.720.000	6.600.000	98,21%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	184.800	-	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000	5.250.000	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.600.000	100.265.847	85,99%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.600.000	66.600.000	100,00%
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.600.000	66.600.000	100,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	50.000.000	33.665.847	67,33%



Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000	30.600.000	87,43%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	3.065.847	20,44%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.532.192	312.582.328	85,05%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.606.830	7.055.281	92,75%
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.606.830	7.055.281	92,75%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.876.274	131.538.890	80,27%
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.435.712	9.947.004	79,99%
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.620.250	17.475.840	93,85%
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.678.640	9.928.950	67,64%
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.466.072	11.447.796	50,96%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	59.450.000	50.485.000	84,92%
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	31.732.000	27.945.500	88,07%
Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.293.600	1.108.800	85,71%
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.200.000	3.200.000	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.456.638	33.097.456	93,35%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.911.838	25.757.456	92,28%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.360.000	7.340.000	99,73%
Premi Asuransi Ketenagakerjaan	184.800	-	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.667.650	4.875.000	31,12%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.667.650	4.875.000	31,12%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.924.800	136.015.701	93,85%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.524.800	-	0,00%



Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.000.000	109.805.701	99,82%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.400.000	26.210.000	99,28%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	288.555.000	283.327.500	98,19%
Pengadaan Mebel	198.545.000	196.303.500	98,87%
Belanja Modal Mebel	198.545.000	196.303.500	98,87%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.010.000	87.024.000	96,68%
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.320.000	26.529.000	97,10%
Belanja Modal Alat Pendingin	13.000.000	12.876.000	99,05%
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.290.000	3.330.000	62,95%
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	33.300.000	33.300.000	100,00%
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11.100.000	10.989.000	99,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167.500.000	62.023.105	37,03%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.500.000	2.500.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000	59.523.105	36,07%
Belanja Tagihan Telepon	1.800.000	473.732	26,32%
Belanja Tagihan Air	18.000.000	8.136.575	45,20%
Belanja Tagihan Listrik	120.000.000	28.383.878	23,65%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.200.000	22.528.920	89,40%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	360.098.600	218.260.261	60,61%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.144.800	194.397.451	68,17%



Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	208.380.000	138.815.100	66,62%
Belanja Suku Cadang Kendaraan Bermotor DPRKP	35.000.000	18.157.151	51,88%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.580.000	12.465.000	75,18%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.000.000	24.775.400	99,10%
Premi Asuransi Ketenagakerjaan	184.800	184.800	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.953.800	23.862.810	31,84%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.060.000	6.005.000	99,09%
Premi Asuransi Ketenagakerjaan	184.800	-	0,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.330.000	-	0,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.855.000	1.605.000	4,74%
Belanja Pemeliharaan PC/Netbook	16.206.000	11.401.610	70,35%
Belanja Pemeliharaan Printer	15.318.000	4.851.200	31,67%
Program Pengembangan Perumahan	570.343.368	438.991.013	76,97%
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	-	0,00%
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000	-	0,00%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000	-	0,00%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	133.727.663	108.155.098	80,88%
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	133.727.663	108.155.098	80,88%
Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.330.000	3.274.500	98,33%
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.682.262	-	0,00%



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.861.802	2.806.080	98,05%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.569.760	3.017.530	84,53%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	765.900	690.000	90,09%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	1.000.000	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.220.000	2.220.000	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.867.684	3.411.063	88,19%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	4.601.505	4.305.500	93,57%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor Lainnya	499.500	450.000	90,09%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.148.850	-	0,00%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	31.600.000	25.270.000	79,97%
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	35.230.000	34.790.000	98,75%
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.600.000	1.600.000	100,00%
Belanja Tagihan Listrik	30.000.000	19.112.525	63,71%
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	4.200.000	3.600.000	85,71%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	554.400	554.400	100,00%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.996.000	2.053.500	51,39%
Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	336.615.705	330.835.915	98,28%



Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	121.990.329	119.227.020	97,73%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.748.914	3.014.430	80,41%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.912.640	2.719.500	93,37%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.935.505	3.600.840	91,50%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.081.250	1.971.250	94,71%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	146.520	132.000	90,09%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.165.500	-	0,00%
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000	99.789.000	99,79%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	7.500.000	100,00%
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	214.625.376	211.608.895	98,59%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.549.006	3.179.493	89,59%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.041.400	2.759.800	90,74%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.849.370	2.516.370	88,31%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.392.380	4.514.950	83,73%



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	654.120	616.050	94,18%
Belanja Makan dan Minuman Rapat	3.829.500	3.660.000	95,57%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.440.000	15.298.100	99,08%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	369.600	-	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	19.785.727	98,93%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	9.000.000	100,00%
Belanja Modal Pilar/ Tugu/ Tanda Lainnya	150.000.000	149.778.405	99,85%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.283.211.700	2.258.502.617	98,92%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	28.844.200	25.102.612	87,03%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	28.844.200	25.102.612	87,03%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.265.400	1.265.400	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.808.300	2.808.300	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.110.000	1.110.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.500	2.430.000	39,44%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	9.988.912	99,89%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	7.500.000	100,00%
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	341.900.760	337.268.750	98,65%
Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	341.900.760	337.268.750	98,65%



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	519.480	519.480	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	843.600	843.600	100,00%
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.096.680	1.095.670	99,91%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.110.000	1.110.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.331.000	-	0,00%
Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000	16.000.000	100,00%
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	150.000.000	148.400.000	98,93%
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	170.000.000	169.300.000	99,59%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.912.466.740	1.896.131.255	99,15%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.893.308.410	1.879.642.327	99,28%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.735.590	7.732.616	99,96%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.261.400	5.210.490	99,03%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.704.180	4.076.900	86,67%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.311.240	3.908.400	90,66%



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	488.400	400.000	81,90%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.318.000	8.968.950	58,55%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.620.000	22.250.000	80,56%
Belanja Jasa Tenaga Ahli	152.000.000	152.000.000	100,00%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	369.600	184.800	50,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	19.410.171	97,05%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	15.000.000	100,00%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.640.000.000	1.640.000.000	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	19.158.330	16.488.928	86,07%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.529.580	1.529.580	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.509.600	1.509.600	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.914.750	1.914.750	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.110.000	1.110.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.594.400	2.924.998	52,28%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	7.500.000	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	35.636.014.236	34.890.157.913	97,91%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	35.636.014.236	34.890.157.913	97,91%



Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	65.815.863	63.289.777	96,16%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.685.468	899.777	53,38%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.085.800	2.786.100	90,29%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.208.455	2.813.850	87,70%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.456.540	3.274.500	94,73%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.160.000	14.845.400	97,92%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	369.600	-	0,00%
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	30.000.000	29.820.150	99,40%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.850.000	8.850.000	100,00%
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	35.467.203.178	34.741.268.956	97,95%
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	106.430.237	102.605.730	96,41%
Belanja Bahan-Bahan Kimia	83.250.000	81.862.500	98,33%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	822.525.000	508.415.950	61,81%
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.000.000	51.565.268	51,57%
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.294.032	7.150.100	98,03%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.358.480	1.926.962	57,38%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.035.070	5.904.645	97,84%



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.744.697	1.840.047	67,04%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.202.010	9.755.790	95,63%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.353.200	2.120.000	90,09%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.356.860.090	9.256.255.750	98,92%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.329.000	4.329.000	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untu Kegiatan Kantor Lainnya	19.380.600	19.377.700	99,99%
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	750.000.000	711.689.918	94,89%
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	204.029.100	157.740.290	77,31%
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17.871.000	12.820.500	71,74%
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	244.422.000	239.220.000	97,87%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	118.125.000	51.750.000	43,81%
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	28.800.000	27.750.000	96,35%
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	285.700.000	252.865.000	88,51%
Belanja Jasa Tenaga Supir	24.275.000	21.885.000	90,15%
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	303.000.000	259.219.536	85,55%
Belanja Tagihan Listrik	21.100.000.000	21.099.001.967	100,00%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.500.800	2.772.000	32,61%
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian - Alat Pengolahan - Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	21.783.750	21.783.750	100,00%



Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja - Alat Pelindung - Sepatu Lapangan	21.845.133	21.645.000	99,08%
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	100.000.000	99.842.874	99,84%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	29.329.965	97,77%
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.600.000	5.700.000	75,00%
Belanja Modal Pagar	1.266.489.000	1.263.553.714	99,77%
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	409.999.979	409.590.000	99,90%
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	89.121.470	72.635.280	81,50%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.947.955	2.435.736	61,70%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.975.130	5.589.960	93,55%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.179.595	1.761.681	55,41%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.298.700	1.143.300	88,03%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.741.250	-	0,00%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.280.000	15.822.300	82,07%
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	184.800	184.800	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	29.233.463	97,44%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	14.950.000	99,67%
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.514.040	1.514.040	100,00%
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	13.873.725	12.963.900	93,44%



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.831.500	1.386.400	75,70%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.254.300	1.055.000	84,11%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	574.425	517.500	90,09%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.665.000	1.665.000	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.498.500	1.440.000	96,10%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.050.000	6.900.000	97,87%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI Rp	TARGET Rp	CAPAIAN %
1.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	85.88	85.93	100.06	43.836.605.045	45.666.570.522	95.99

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja 100,06% dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 95,99%. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85,88 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.666.570.522,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 43.836.605.045,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.829.965.477,-

Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi 2025 - 2029 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut



telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85,93 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 43.836.605.045 (empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu empat puluh lima rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah 95,99 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Tindak Lanjut untuk meningkatkan Kinerja Tahun 2025 :

1. Program SIPANJUL (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan) merupakan aplikasi berbasis web yang mana dirancang untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi guna meningkatkan administrasi pada kantor DPRKP agar lebih efisien, lebih mudah, cepat, dan terarsipkan dengan rapi. Aplikasi ini terbuka untuk umum yang mana masyarakat bisa mengajukan lampu dan pelaporan jalan melalui website dan bisa di pantau apakah sudah dilakukannya perbaikan, diterima atau tidak proposal pengajuan lampu jalannya. Untuk staf administrasi perkantoran



DPRKP Bidang PSU dapat melakukan pemetaan lokasi lampu jalan dan kwh meter. Bisa juga di lakukannya penjadwalan melalui web, pengeluaran barang dan penghitungan stand meter / pemakaian kwh meter perbulannya.

2. Melakukan Efisiensi Anggaran.

Jambi, 10 Januari 2026



KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAIRY KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI

DI WILDAN MURTADHO AL-IDRUS, SP, M.H

Pembina

NIP. 19780509 200901 1 013



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2025